



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA



Web : <https://sman3malra.sch.id> & Email: humas@sman3malra.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Nama Sekolah : SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas / Semester : X / GANJIL
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit

Kompetensi Inti K-3	Kompetensi Inti K-4
Memahami , menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Materi Pembelajaran
3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	3.1.1 Siswa dapat mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 3.1.2 Siswa dapat Mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 3.1.3 Siswa dapat Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan	* Mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara * Mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	* Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan

	<p>menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>3.1.4 Siswa dapat Mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>3.1.5 Siswa dapat Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>*Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>* Mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>* Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>* Siswa dapat menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>*</p>	<p>Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c.Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan</p>
<p>4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>4.1.1 Menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.2 Mengkomunikasi hasil ananlisi terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>		

Pendekatan Pembelajaran	Model Pembelajaran	Metode pembelajaran	Sumber belajar	Bahan /Alat Pembelajaran
-------------------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

Pendekatan Kontekstual (CTL.) pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka.	Model Pembelajaran Kooperatif	Diskusi, Tanya jawab dan ceramah	- Buku PR dan Buku Siswa PPKn Kelas X untuk SM A/MA/SMK/MAK, Tolib dan Nuryadi, 2017, Jakarta, Gramedia - Internet	-Penggaris, spidol, papan tulis & infocus

Kegiatan Pembelajaran		
	Aktifitas kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional (PPK) • Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) sesuai protocol COVID 19 • Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan • Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 	10 menit
Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar 1.1 tentang foto Presiden dengan para menteri di Istana Negara serta membaca buku Bab I Sub Bab A Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. <p>* Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait dengan pembagian kekuasaan negara RI.</p> <p>* Guru membagi peserta didik dalam 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang siswa, dengan pembagian tugas sebagai berikut :</p> <p>Kelompok 1 dan 2 Analisis tentang Kekuasaan Eksekutif</p>	65 menit

	Kelompok 3 Analisis tentang Kekuasaan Yudikatif Kelompok 4 dan 5 Analisis Kekuasaan Legislatif	
Penutup	* Guru membimbing peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, analisis serta berlangsungnya tugas kelompok. *laporan dibuat dalam bentuk laporan tertulis *Guru bersama peserta didik merefleksikan atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang telah mereka lakukan.pengalaman belajar • Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan berdoa	15 menit

Penilaian		
Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
* Pengamatan Siswa melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi terkait topic pembelajaran untuk menemukan informasi dari potongan gambar. *Penilaian Diri Menilai faktor kognitif dan afektif diri yang ditunjukan dalam pembelajaran	* Tes Tertulis Memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa yang berhubungan dengan Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.	*penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok.

Maluku Tenggara , 23 Juni 2021

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

DOMITILLA TENIWUT,S.Pd
NIP. 19670302 199512 2 002

SENIYATIK S. DONGGIO, S.Sos
NIP. 19790324 200904 2 003

1. Teknik Penilaian (terlampir)

a. Sikap

- Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	Soedarmono	75	75	50	75	275	68,75	C
2	

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = $100 \times 4 = 400$
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = $275 : 4 = 68,75$
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

- Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format penilaian :

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide/gagasan.	50		250	62,50	C
2	Ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara.		50			
3	Saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.	50				
4	...	100				

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 x 100 = 400
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (250 : 400) x 100 = 62,50
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan

- **Penilaian Teman Sebaya**

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya :

Nama yang diamati : ...

Pengamat : ...

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Mau menerima pendapat teman.	100		450	90,00	SB
2	Memberikan solusi terhadap permasalahan.	100				
3	Memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok.		100			
4	Marah saat diberi kritik.	100				
5	...		50			

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 100 = 90,00
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)

- **Penilaian Jurnal** (*Lihat lampiran*)

b. Pengetahuan

- **Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda** (*Lihat lampiran*)
- **Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan**
Praktek Monolog atau Dialog

Penilaian Aspek Percakapan

No	Aspek yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		25	50	75	100			

No	Aspek yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		25	50	75	100			
1	Intonasi							
2	Pelafalan							
3	Kelancaran							
4	Ekspresi							
5	Penampilan							
6	Gestur							

- **Penugasan** (*Lihat Lampiran*)

Tugas Rumah

- Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik
- Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas rumah dengan baik
- Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian.

c. **Keterampilan**

- **Penilaian Unjuk Kerja**

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kata				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				
4	Pelafalan				

Kriteria penilaian (skor)

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

Instrumen Penilaian Diskusi

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1	Penguasaan materi diskusi				
2	Kemampuan menjawab pertanyaan				
3	Kemampuan mengolah kata				
4	Kemampuan menyelesaikan masalah				

Keterangan :

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

- **Penilaian Proyek** (*Lihat Lampiran*)
- **Penilaian Produk** (*Lihat Lampiran*)
- **Penilaian Portofolio**
Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll

Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1					
2					
3					
4					

2. Instrumen Penilaian (terlampir)

- a. Pertemuan Pertama
- b. Pertemuan Kedua
- c. Pertemuan Ketiga

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :

- 1) Jelaskan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara!
- 2) Jelaskan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian!
- 3) Jelaskan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan!

CONTOH PROGRAM REMIDIAL

Sekolah :

Kelas/Semester :

Mata Pelajaran :

Ulangan Harian Ke :

Tanggal Ulangan Harian :

Bentuk Ulangan Harian :

Materi Ulangan Harian :

(KD / Indikator) :

KKM :

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- 1) Membaca buku-buku tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang relevan.
- 2) Mencari informasi secara online tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
- 3) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
- 4) Mengamati langsung tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang ada di lingkungan sekitar.

MATERI PELAJARAN BAB I

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab I adalah **Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara**, dengan Sub Bab sebagai berikut :

1. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kedudukan dan fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian.
3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan

I. PERTEMUAN PERTAMA

A. MACAM-MACAM KEKUASAAN

Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu :

- a) Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membnetuk undang-undang.
- b) Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c) Keuasaan Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkam menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi :

- a) Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b) Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c) Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

B. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertical.

a) Pembagian kekuasaan secara horizontal

- 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Kekuasaan Yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Kekuasaan eksaminatif atau ispektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pembagian kekuasaan secara vertical

Pembagian kekuasaan secara vertical merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas Desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.